

2). Kesehatan

Pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor di masyarakat.

Capaian pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang kesehatan pada tahun 2020 terbilang baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa capaian antara lain ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia pendidikan dasar, penderita hipertensi, penderita DM, ODGJ dan Penderita TBC yang mendapatkan layanan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Permenkes tentang Standar Pelayanan Minimal.

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 95,12%, sehingga terdapat 4,82% ibu hamil yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, hal ini dikarenakan:

- Selama pandemi, kunjungan ibu hamil ke puskesmas menurun. Bahkan setelah ada pengaturan jadwal kunjungan dan dilakukan kunjungan luar gedung, masih terdapat ibu hamil yang tidak berkunjung sesuai dengan jadwal.
 - Masih terdapat Ibu hamil datang pertama kali ke puskesmas sudah lewat dari 12 minggu jadi tidak bisa dihitung sebagai K1.
 - Terdapat Ibu hamil yang yang memeriksa ke fasilitas kesehatan swasta, kunjungan K1 nya tidak terpantau.
 - Terdapat kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sehingga ketika kunjungan ke puskesmas sudah lewat K1 dan K2.
- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sebesar 99,91%. Artinya sebesar 0,09% ibu bersalin tidak mendapatkan pelayanan persalinan.Hal ini disebabkan oleh:
- Lahir spontan di rumah sebelum mendapatkan pertolongan nakes.
 - Ibu hamil datang ke Rumah Sakit untuk persalinan tetapi sesuai indikasi medis dipulangkan, namun ternyata sampai rumah melahirkan.
 - Ibu hamil menyandang gangguan jiwa (ODGJ) melahirkan di rumah
 - Beberapa ibu hamil tidak melakukan kunjungan nifas ketiga ke fasyankes karena pandemi covid meskipun telah dilakukan konsultasi kesehatan oleh puskesmas lewat whatsapp.

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 84,60 % sehingga terdapat 15,40% bayi belum mendapatkan pelayanan kesehatan bayi belum lahir. Hal ini disebabkan karena beberapa bayi baru lahir belum dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Kunjungan Neonatal (KN3) ditunda bahkan tidak dilakukan karena kondisi pandemi covid.

Capaian pelayanan kesehatan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 72,80%. Capaian pelayanan kesehatan balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan kondisi pandemi covid yang berimbas pada belum maksimalnya pelayanan oleh posyandu dan kegiatan luar gedung dalam pelaksanaan Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB).

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 95,61%. Capaian pelayanan kesehatan balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100 % disebabkan adanya pandemik covid-19 sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaan skrining, sebagian besar skrining (pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar) dilakukan melalui aplikasi mobscreen penjarkes. Aplikasi online ini memerlukan kerjasama aktif dari para wali murid dan guru. Sedangkan yang menjadi kendala yaitu masih adanya wali murid belum bisa menggunakan aplikasi ini.

Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 69,70%. Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100 % disebabkan pandemi covid sehingga screening tidak maksimal. Selama pandemi kegiatan masyarakat dibatasi, sehingga skrining dilakukan jika telah mendapat ijin pelaksanaan pertemuan. Pelayanan kesehatan pada usia produktif di dalam gedung juga turun karena kunjungan ke puskesmas menurun.

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 21,94 %. Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:

- selama pandemi kegiatan luar gedung tidak berjalan, screening dioptimalkan pada kunjungan lansia di puskesmas padahal kunjungan pasien juga menurun.
- Banyak lansia yang masih terkendala dalam pengisian instrument Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan.

Capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 61,09 %. Capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:

- Kerja sama dengan jejaring swasta untuk pelaporan kasus masih kurang, sehingga penderita Hipertensi yang mengakses fasyankes swasta belum terdata.
 - Kunjungan menurun karena ketakutan masyarakat periksa di layanan Kesehatan selama era pandemi. Selain itu, kegiatan pelayanan diluar gedung juga menurun.
- Capaian pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 61,09%. Capaian pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:
- Kerja sama dengan jejaring swasta untuk pelaporan kasus masih kurang, sehingga penderita Hipertensi yang mengakses fasyankes swasta belum terdata
 - Kunjungan menurun karena ketakutan masyarakat periksa di layanan Kesehatan selama era pandemi. Selain itu, kegiatan pelayanan diluar gedung juga menurun

Capaian pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 92,56 %. Capaian pelayanan kesehatan pada penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:

- Kunjungan menurun karena ketakutan masyarakat periksa di layanan Kesehatan selama era pandemi. Selain itu, kegiatan pelayanan diluar gedung juga menurun
- Kesadaran Pasien dan keluarganya untuk rutin berobat masih rendah.

Capaian pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100 %.

Capaian pelayanan kesehatan pada orang risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 95,6%. Capaian belum mencapai 100 % hal ini disebabkan karena adanya pandemik covid sehingga:

- Pemeriksaan ANC terpadu tidak dilakukan pada beberapa ibu hamil
- Layanan VCT mobile terhenti

3). Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan wajib daerah yang sangat berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur. Pelayanan dasar meliputi air minum,

sanitasi lingkungan, jalan, dan irigasi.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Realisasi capaian layanan SPM bidang urusan pekerjaan umum di Kabupaten Bantul tahun 2020 menunjukkan bahwa jenis layanan dan mutu layanan per jenis pelayanan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam perencanaan atau terealisasi 100%. Penyediaan air minum maupun pengolahan limbah domestik adalah sebesar 100%. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh rumah tangga di Kabupaten Bantul telah memperoleh akses kebutuhan air minum dan akses pengolahan limbah domestik. Pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Bantul sebagian besar didapat melalui SPAM bukan jaringan perpipaan, yakni sebanyak 283.171 rumah tangga, berbanding 46.445 rumah tangga yang memperoleh layanan melalui SPAM jaringan perpipaan. Pemenuhan pengolahan air limbah juga serupa dengan pemenuhan kebutuhan air minum, dimana pada pengolahan limbah domestik sebagian besar pemenuhan layanan berasal dari SPALD-S. Pengolahan melalui SPALD-S adalah sebesar 314.867 rumah tangga, berbanding 14.749 rumah tangga melalui SPALD-T.

4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah, mengurangi kawasan kumuh perkotaan, serta penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebanyak 10 pembangunan rumah (realisasi 100%). Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota sebanyak 3 KK (realisasi 100%) berupa stimulan bahan bangunan. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yang ditangani adalah sebesar 82,99%.

5). Trantibum Linmas

Masyarakat memiliki harapan yang tinggi akan kondisi ketentraman dan ketertiban yang aman dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban. Upaya ini tentunya dapat berjalan karena adanya sinergi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat itu sendiri.

Sepanjang tahun 2020, pelayanan terhadap penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban maupun penegakan Peraturan Daerah sudah terpenuhi. Sebanyak 139 aduan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dapat diselesaikan dengan baik. Jumlah penegakan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan sebanyak 32 peraturan dan semuanya dapat ditegakkan (realisasi sebesar 100%).

Pelayanan kebencanaan juga menjadi satu hal penting yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul. Layanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain meliputi pemberian informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Di tahun 2020, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah diberikan kepada 3.159 korban yang mengalami bencana seperti longsor, kebakaran dan banjir.

6). Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dengan tujuan:

- meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pada tahun 2020 terdapat 15.734 penyandang disabilitas terlanter, anak terlanter, lanjut usia terlanter dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (realisasi sebesar 100%). Capaian pemenuhan SPM bidang urusan sosial per jenis layanan di Kabupaten Bantul mencapai 100%.

5. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri merupakan hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Pada tanggal 25 April 2020, Kabupaten Bantul mendapatkan piagam penghargaan dari Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3,4463 dan status kinerja sangat tinggi. Sementara itu, hasil penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Gambar 2
Piagam Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah



6. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran

Tabel 7. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Anggaran Daerah Tahun 2020

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)*	Realisasi * (Rp)	%
Pendapatan			
Pendapatan asli daerah	420.780.615.321,87	479.604.971.572,42	113,98
Dana perimbangan	1.279.745.464.554,00	1.268.337.753.395,00	99,11
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	456.885.750.498,32	356.892.097.672,00	78,11
Jumlah pendapatan	2.157.411.830.374,19	2.104.834.822.639,42	97,56
Belanja			
Belanja tidak langsung	1.389.050.261.074,07	1.170.873.717.698,78	84,29
Belanja langsung	994.408.391.331,10	923.268.325.425,99	92,85
Jumlah belanja	2.383.458.652.405,17	2.094.142.043.124,77	87,86
Surplus / (defisit)	(226.046.822.030,98)	(10.692.779.514,65)	-4,73
Pembiayaan daerah			
Penerimaan pembiayaan daerah	263.047.636.293,60	238.678.713.544,54	90,74
Pengeluaran pembiayaan daerah	37.000.814.262,62	11.598.814.262,62	31,35
Pembiayaan netto	226.046.822.030,98	227.079.899.281,92	100,46
Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)	0,00	237.772.678.796,57	0,00

Sumber: BKAD, 2021

Ket: * (unaudited)

7. Inovasi Daerah

Capaian hasil inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bantul antara lain:

- Layanan Mobil Keliling Pajak Bantul



Layanan Aplikasi Pajak Bantul (LAPak Bantul)



Penggunaan Digital Signature dan Barcode pada SPPT PBB-P2



- Pembenahan Data Piutang PBB-P2 by obyek

8. Penghargaan

Sejumlah penghargaan diperoleh Kabupaten Bantul antara lain sebagai berikut:

- Kabupaten Bantul memperoleh dua penghargaan dalam penganugerahan Bhumandala Award 2020 yaitu Bhumandala Rajasa dalam kategori simpul jaringan terbaik kabupaten dan Bhumandala Kencana dalam kategori geoportal terbaik kabupaten. Penghargaan diterima oleh Pjs Bupati Bantul, Budi Wibowo, S.H., M.H di Hotel Borobudur Jakarta, 27 November 2020.



- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada Senin 14 Desember 2020 mendapatkan penghargaan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.



- Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul juga meraih dua kategori penghargaan keterbukaan informasi publik pada tahun 2020 yaitu peringkat II Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dengan nilai 92.00 dan Badan Publik dengan Kualifikasi "Informatif" dengan nilai 98.62



Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 ini kami sampaikan. Kepada seluruh masyarakat Bantul, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga cita-cita Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbhineka Tunggal Ika dapat kita capai bersama. Amin.

